

Nilai-nilai Islam dalam Politik dan Hubungan Internasional Islamic Values in Politics and International Relations

Muhammad Ikhsan Firdaus^{a*}

^aUniversitas Paramadina

Email: muhammad.firdaus3@students.paramadina.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 3 Oktober 2025

Revised : 18 Oktober 2025

Accepted : 27 Oktober 2025

Keywords:

Islam, Islamic values,
international relations,
political implementation

Kata Kunci:

Islam, nilai-nilai Islam,
hubungan internasional, Politik

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Islam is currently the second-largest religion in the world, with 1.6 billion adherents, representing about 23% of the global population, spread across various regions of the world. As a religion, Islam possesses values that can be applied in governance. This has led many politicians from Muslim-majority countries to explore ways of implementing these values in state affairs, while many Islamic scholars have sought to define the concept of an ideal Islamic state. In practice, however, the implementation of Islamic values in governance has faced significant challenges. From the time of Prophet Muhammad's (PBUH) passing until today, conflicts have repeatedly occurred in Muslim-majority countries. In the modern era, a key challenge is how Muslim-majority states can strengthen the bonds of brotherhood among Muslims (*ukhuwah islamiyah*). The question is how Islam can be applied as a guiding value in building a nation and in bridging relations between states, whether with other Muslim-majority countries or with those of different faith majorities.

ABSTRAK

Islam adalah agama terbesar kedua di dunia saat ini. dengan jumlah penganut 1,6 miliar atau 23% penduduk bumi penganut agama Islam tersebar di berbagai belahan dunia. Sebagai agama Islam memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam bernegara. Hal ini yang membuat banyak politisi dari negara mayoritas Muslim mencoba bagaimana menerapkannya dalam hal kenegaraan, banyak juga pemikir Islam yang mencari tahu bagaimana konsep negara Islam yang ideal. Dalam praktiknya tentu saja penerapan terkait nilai keislaman mendapatkan jalan terjal, dari zaman wafatnya Nabi Muhammad SAW, hingga saat ini, selalu ada saja konflik yang terjadi di negara-negara mayoritas Muslim. Tantangan pada modern ini bagaimana cara agar negara-negara dengan mayoritas Muslim bisa meningkatkan tali persaudaraan antar Muslim (*ukhuwah islamiyah*). Bagaimana Islam dapat diterapkan menjadi nilai,

dalam membangun negara dan menjembatani hubungan antar negara, baik ke negara yang mayoritas Muslim, atau yang tidak.

LATAR BELAKANG

Hingga dengan saat ini agama Islam adalah agama dengan penganut terbanyak kedua di dunia. Berdasarkan data dari [Pew Research Center](#) di tahun 2012, berdasarkan analisis lebih dari 2.500 sensus, survei, dan registrasi penduduk, Pew Research Center mendapatkan bahwa jumlah penganut agama Islam berjumlah 1,6 miliar, atau dapat dikatakan bahwa 23% penduduk dunia adalah muslim. Kristen masih menjadi agama terbesar di dunia dengan jumlah penganut 2,2 miliar, atau 32% dari populasi dunia. Umat Hindu berjumlah 1 miliar, 15% penduduk dunia. Setelah itu ada 500 juta umat Buddha (7%), dan 14 juta umat Yahudi (0,2%) di seluruh dunia pada tahun 2010. Selain itu, lebih dari 400 juta orang (6%) mempraktikkan berbagai agama rakyat atau tradisional, termasuk agama tradisional Afrika, agama rakyat Tionghoa, agama asli Amerika, dan agama asli Australia. Diperkirakan 58 juta orang - sedikit kurang dari 1% dari populasi global - adalah penganut agama lainnya, termasuk agama Baha'i, Jainisme, Sikhisme, Shintoisme, Taoisme, Tenrikyo, Wicca, dan Zoroastrianisme. Pada saat yang sama, studi baru oleh Pew Forum juga menemukan bahwa sekitar satu dari enam orang di seluruh dunia (1,1 miliar, atau 16%) tidak memiliki afiliasi agama. Ini menjadikan kelompok yang tidak berafiliasi sebagai kelompok keagamaan terbesar ketiga di seluruh dunia, setelah umat Kristen dan Islam, dan sekitar seukuran populasi Katolik dunia. Survei menunjukkan bahwa banyak dari yang tidak berafiliasi memegang beberapa keyakinan agama atau spiritual (seperti kepercayaan kepada Tuhan atau roh universal) meskipun mereka tidak mengidentifikasi diri dengan kepercayaan tertentu (Pew Research 2012).

Politik dalam Islam sendiri telah bergejolak semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, beberapa golongan umat Islam saat itu, mempercayai bahwa kelanjutan kepemimpinan Islam ada pada Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini dimulai dari Haji Wadak, atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika perjalanan pulang ke Madinah, Nabi Muhammad SAW sempat menyampaikan beberapa pesan penting di wilayah Ghadir Khum, penganut Syiah mempercayai bahwa di saat itu Nabi Muhammad SAW, berpesan bahwa Ali bin Abi Thalib, adalah pemimpin Islam (khalifah) setelah wafat beliau. Hingga saat ini Syiah secara rutin memperingati peristiwa Ghadir Khum tiap tahunnya, dengan sebutan Idul Ghadir.

Islam tidak seperti agama Katolik yang memiliki pemimpin tertinggi berupa Paus, oleh sebabnya sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, tafsir dan hadis berupa kepemimpinan dalam Islam dapat diinterpretasikan berbeda antara umat. Seperti negara-negara mayoritas Muslim di berbagai dunia, mereka menggunakan menggunakan Islam sebagai nilai dalam beragama, hanya saja setiap negara memiliki perbedaan dalam nilai tersebut, seperti contoh Iran dan Arab Saudi saat ini.

Sistem monarki Arab Saudi berdasarkan pada solidaritas kekeluargaan dan kesukuan, hal ini sama seperti model dari monarki pada umumnya, atau dalam sejarah Islam mirip dengan model Kekhalifahan Bani Umayyah. Kerajaan Saudi saat ini telah berhasil menyatukan berbagai macam suku yang tersebar di wilayahnya. Sementara Iran memiliki model negara yang berbeda, dengan

model Republik Islam, Iran menjadi negara yang memiliki konsep demokrasi, berbagai lembaga negara seperti legislatif, dan eksekutifnya merupakan produk politik modern, dan tidak menyerupai model kepemimpinan Islam terdahulu. Hanya saja dalam menjalankan negara, Iran memiliki memasukan pemimpin agama tertinggi (Imam) sebagai pengawas dari berjalannya negara tersebut. Sebagaimana keyakinan Syiah untuk mengikuti Imam, pemimpin tertinggi sekarang adalah pengganti Imam Mahdi, yang sampai dengan saat ini masih dalam persembunyiannya (Ayoob and Lussier 2020).

Di belahan dunia lain, negara dengan mayoritas Muslim juga dapat menjalankan nilai demokrasi sebagaimana Indonesia, Tunisia, dan Turki. Ketiga negara ini mempraktekan bagaimana aktor Islam dapat mendorong demokratisasi. Indonesia dan Tunisia memberikan bukti kuat tentang kontribusi partai politik Islamis yang *rahmatan lil alamin* terhadap sistem demokrasi dan integrasi ke dalamnya. Dua kasus ini juga mengungkapkan bahwa pengaturan demokratis mempromosikan berbagai ekspresi politik Islam di negara-negara Muslim, lebih lanjut menggugurkan mitos Islamisme sebagai monolitik. Indonesia dan Tunisia adalah dua demokrasi paling kokoh di dunia Muslim. Indonesia adalah negara Muslim terbesar dari segi populasi dan telah membangun demokrasi yang paling bertahan lama di antara rezim mayoritas Muslim. Tunisia adalah satu-satunya negara yang berhasil beralih ke demokrasi setelah menggulingkan otoriter Zine El Abidine Ben Ali sebagai bagian dari pemberontakan Arab 2011. Negara ini tetap menjadi satu-satunya demokrasi di dunia Arab. Turki, terletak secara strategis di tempat Asia dan Eropa bertemu, adalah anggota lama Organisasi Traktat Atlantik Utara (NATO) dan calon anggota Uni Eropa (UE). Meskipun beralih untuk membatasi secara ketat lembaga-lembaga demokrasi dan keterbukaan politik setelah upaya kudeta 2016, Turki telah terlibat paling lama dengan institusi-institusi perwakilan dan politik demokratis di dunia Muslim, yang sudah berlangsung selama tujuh dekade. Negara ini juga memiliki sejarah partai Islamis yang terlibat secara terbuka dalam arena politik setidaknya sejak awal tahun 1970-an. Ketiga negara ini memiliki beberapa karakteristik yang telah membantu Islamis dalam upaya mereka untuk mengakomodasi demokrasi dengan Islam politik. Ketiganya mengembangkan identitas nasional yang bermakna sebagai bagian dari perjuangan mereka untuk kemerdekaan pasca-kolonial atau pasca-imperial. Identitas nasional yang muncul, sambil memberikan ruang bagi ketakwaan agama, tidak terkait begitu erat dengan identitas keagamaan seperti nasionalisme yang berakar di sebagian besar dunia Arab dan Pakistan. Ketiga negara memiliki rezim otoriter atau hibrida yang mencakup arsitektur institusi multipartai dan perwakilan selama beberapa dekade. Meskipun pemilihan ke institusi-institusi ini jarang adil dan bebas, keberadaannya memberikan kerangka bagi Islamis untuk menyampaikan keluhan dan keinginan mereka secara *rahmatan lil alamin*: sebagai partai politik. Upaya demokratisasi yang dilakukan oleh partai Islamis di Indonesia, Tunisia, dan Turki mengungkapkan baik potensi moderasi perilaku maupun ideologis yang ditawarkan oleh demokrasi, dan risiko yang dihadapi oleh partai Islamis oleh aktor-aktor pinggiran dalam konteks demokratis.

Dalam dunia internasional, negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim ini melakukan interaksi satu sama lain. Hingga saat ini ada 57 negara yang tergabung dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Organisasi ini merupakan suara kolektif dunia Muslim yang dimana OKI berusaha untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian

dan harmoni internasional di antara berbagai bangsa di dunia. OKI didirikan berdasarkan keputusan dari pertemuan bersejarah yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijriah (25 September 1969) menyusul pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Program baru OKI-2025 berakar dalam ketentuan Piagam OKI dan berfokus pada 18 area prioritas dengan 107 tujuan. Area-area prioritas tersebut meliputi isu Perdamaian dan Keamanan, Palestina dan Al-Quds, Pengentasan Kemiskinan, Penanggulangan Terorisme, Investasi dan Keuangan, Ketahanan Pangan, Sains dan Teknologi, Perubahan Iklim dan Keberlanjutan, Moderasi, Budaya dan Harmoni Antar Agama, Pemberdayaan Perempuan, Aksi Kemanusiaan Islam Bersama, Hak Asasi Manusia dan Tata Pemerintahan yang Baik, antara lain(OIC).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan berbagai literatur baik dari artikel di internet, jurnal, esai, buku, atau sumber literatur lainnya. Hal ini dilakukan untuk membuka paradigma baru terkait politik Islam di dalam dunia internasional, juga sebagai tambahan wawasan terkait kondisi politik Islam internasional kini.

Pertama ada penelitian berjudul "*FROM KHILĀFAH TO MODERN STATE: The History of Islamic Political Transformation,*" jurnal yang ditulis oleh Ahmad Khoirul Fata, Adnan, dan Mahfud Fauzi, yang diterbitkan pada 2021. Kesimpulan pada penelitian ini berupa hubungan antara Islam dan politik telah terjadi sejak awal Islam, dan terus berlangsung seperti yang terjadi saat ini. Kedua konsep tersebut saling berhubungan untuk menciptakan dinamika menarik sepanjang sejarah setiap era. Dalam peta perpolitikan Islam tidak ada pola pasti. Penerapan ajaran Islam dalam berbagai situasi telah menimbulkan beragam praktek dari politik Islam itu sendiri. Secara historis, politik Islam tampaknya dinamis dan berwarna-warni. Dalam konteks tersebut, politik Islam sejak zaman Nabi hingga era khilafah telah memberikan deskripsi tentang sebuah sistem yang berpusat pada pemimpinnya. Situasi ini berubah ketika politik lama (khilafah) mengalami krisis dan digulingkan pada awal abad kedua puluh. Umat Islam mulai berinteraksi dengan gagasan politik Barat yang sangat berbeda dari politik Islam lama. Krisis dan gejolak ini mendorong para pemikir Islam untuk merumuskan institusi politik modern baru yang mengikuti nilai-nilai Islam (Fata and Fauzi 2021).

Penelitian kedua berjudul "*Islamic view towards International Relations,*" yang ditulis oleh Samih Salah Mohammed. Pada jurnalnya dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan nilai perdamaian, Islam juga menekankan pentingnya dialog antar sesama untuk kepentingan berbagai pihak. Karena nilai yang diajarkan oleh Islam sendiri, maka Islam bisa menjadi perspektif alternatif tentang politik, dan hubungan internasional. Islam tidak mengucilkan non-Muslim, bahkan Islam juga menjamin hak-hak yang bukan beragama Islam. Nilai keadilan, perdamaian, dan kerjasama menjadi prinsip Islam itu sendiri. Di sisi lain diharapkan agar budaya Arab, dan Islam dapat berdialog dengan budaya lain, agar dapat mengintegrasikan setiap ide (Mohammed 2024). Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia juga menggunakan Islam sebagai sarana untuk *soft diplomacy*-nya. Hal ini ditulis pada jurnal berjudul "*Moderate Islam as New Identity in Indonesian Foreign Policy: Between Global Role Aspiration and Co-Religious*

Solidarity,” yang ditulis oleh Aryanta Nugraha, dimana Indonesia bisa menjadi juru perdamaian di dunia Islam. Indonesia pernah terlibat dalam penengah perdamaian di Kamboja, Filipina Selatan, serta penyelesaian dapat menyelesaikan masalah separatis Muslim di Provinsi Aceh. Pada April 2007, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ulama dan cendekiawan Sunni dan Syiah sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di antara faksi-faksi yang bertikai di Irak dan Iran. Selain itu, Indonesia telah dihubungi oleh sejumlah negara Barat dan juga pemerintah Israel untuk mendekati pemerintahan Hamas, guna meyakinkannya untuk memoderasi posisinya. Ketika berkunjung ke Jakarta, Presiden Mahmoud Abbas dari Palestina juga mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam pertemuan Annapolis yang diselenggarakan oleh Presiden Bush pada tahun 2007, untuk membahas masalah Israel-Palestina. Selain itu, militer Indonesia juga bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Selatan Lebanon pada tahun 2006 dalam misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), sebagai negara Muslim pertama yang terlibat dalam misi tersebut (Nugraha 2012).

Pada tahun 2020, saat Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali diselenggarakan, juga diadakan forum dialog keagamaan yang dikenal sebagai R20. Forum ini diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama, petinggi Nahdlatul Ulama saat itu, Yahya Cholil Staquf, menyampaikan bahwa R20 mengangkat tema "Mengungkap dan Mengembangkan Agama sebagai Sumber Solusi Global". Fokus pertama forum ini adalah menangani masalah realitas hubungan antar komunitas agama yang berbeda, yang masih menjadi tantangan serius dalam berbagai krisis global saat ini. Fokus kedua adalah bagaimana para pemimpin agama dapat mengembangkan visi tentang peran agama sebagai sumber solusi untuk berbagai masalah global. "Upaya yang akan ditempuh adalah dengan menanamkan nilai-nilai luhur dan spiritual agama ke dalam dinamika politik dan ekonomi internasional," kata Gus Yahya (IQBAL BASYARI 2022).

Untuk mencapai tujuan besar ini, PBNU bermitra dengan Liga Muslim Dunia (MWL) untuk bekerja sama dalam memperkuat peran agama dalam diplomasi global. Kemitraan dengan MWL dianggap penting karena organisasi tersebut dianggap sebagai salah satu yang terpenting dalam dunia Muslim. "Dengan kolaborasi dengan Liga Muslim Dunia, kami berharap visi untuk membawa gerakan ini menjadi gerakan global dapat terwujud dengan memanfaatkan segala sumber daya dan jaringan yang dimiliki oleh Liga Muslim Dunia," katanya (IQBAL BASYARI 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel ini adalah penelitian kualitatif, dan akan menggunakan telaah pustaka yang telah dikumpulkan oleh penulis, dan akan penulis analisa berdasarkan fenomena yang terjadi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tidak adanya konsep pasti dalam bentuk negara Islam membuat banyak negara dengan mayoritas Muslim mencari jati diri negaranya masing-masing. Mereka juga membuat konsep akan negara Islam versi mereka masing-masing.

Dalam Islam, politik bukan berarti merebut, atau melanggengkan kekuasaan, tapi bagaimana mengimplementasi nilai-nilai Islam, seperti nilai kebijaksanaan, keadilan, kejujuran, amanah, toleran, juga mengadakan musyawarah untuk mencari jalan tengah dari suatu persoalan.

Surah Shad [38]: ayat 26

دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الدَّيْنَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

artinya: *(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."*

Pada surah Shad ayat 26 ini, melalui tafsir dari Kementerian Agama dijelaskan bahwa Allah SWT memilih Nabi Daud sebagai khalifah, karena ketaatan, dan kebijaksanaannya, "Wahai Nabi Dawud! Sesungguhnya engkau telah Kami jadikan khalifah dan penguasa di bumi. Karena itu, hasilah kekuasaanmu dengan kesopanan dan tunduk pada aturan Kami. Maka berilah keputusan tentang suatu perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil dan mengacu pada wahyu Kami, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu dalam menjalankan amanah Kami karena hawa nafsu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah dan menggiringmu jauh dari kebenaran Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akibat mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab yang berat dan pedih di akhirat. Yang demikian itu karena mereka melupakan hari perhitungan, hari ketika perbuatan manusia dihisab. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, amanah, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Surah An-Nisa [4]: ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Tafsir dari surah An-Nisa ayat 58 ini adalah AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil.

Dalam Islam juga tidak ada paksaan untuk umat dari agama lain agar juga menjadi penganut agama Islam. Tidak adanya paksaan, membuat nilai-nilai keislaman bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara, dan berbangsa

Surah Al-Baqarah [2]: ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya: *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Meski memiliki kekuasaan yang sangat luas, Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran-Nya. Tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan, padahal sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Oleh karena itu, janganlah kamu menggunakan paksaan apalagi kekerasan dalam berdakwah. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara yang terbaik.

Baik dan buruknya seorang muslim berhubungan dengan keimanannya akan nilai-nilai Islam itu sendiri. Bagaimanapun menginterpretasikan Islam, perintah dalam Islam adalah bagian penting dari cara kita berdiskusi tentang agama itu sendiri. Jalan menuju keselamatan tidak hanya tentang melakukan ritual atau ibadah personal, tapi juga tentang bagaimana seorang muslim memperlakukan orang lain dalam komunitas dan mencoba membangun hubungan yang baik dengan mereka. Intinya, seruan dalam Islam bukanlah tentang hal-hal seperti substansi atau pemikiran rasional tradisional, tapi lebih tentang bagaimana kita memahami perbedaan antara yang baik dan yang buruk (Armando Salvatore 2016).

Hukum Islam memberikan panduan moral untuk masyarakat Muslim, dilain pihak ada tarekat Sufi yang dapat memberikan kepemimpinan moral, selain itu ada untuk kehidupan sosial terdapat waqf, yang berfungsi mengamankan kesejahteraan umum, terutama dalam bidang "pendidikan" dan "amal." Waqf dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan institusionalnya. Meskipun demikian, tingkat formalitas yang ringan dan fleksibel dijamin oleh hukum waqf (Armando Salvatore 2016)..

Salah satu masalah pada negara dengan mayoritas Islam saat ini adalah, tidak adanya peran pemimpin yang kompeten, pemimpin yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan sebagainya. Data dari Transparency International, melalui data peringkat indeks persepsi korupsi pada 2023, Somalia dinobatkan menjadi negara dengan indikasi korupsi terbesar di dunia, Somalia hanya mendapatkan skor 11. Syria mendapatkan skor 13, Yaman mendapatkan skor 16, sedangkan Indonesia mendapat nilai 34. Sedangkan negara bukan mayoritas Muslim mendapatkan peringkat tinggi, Denmark berada di peringkat 1, dengan skor 90. Finlandia peringkat 2, dengan skor 87, dan Selandia Baru berada di peringkat 3 dengan skor 85 (Transparency International 2023).

Konflik antar sekte juga menjadi suatu persoalan bagi dunia Islam. Pertikaian antara Sunni dengan Syiah membuat kerukunan atau persaudaraan antar umat Islam menjadi renggang. Di era modern,

konflik ini terjadi pasca revolusi Iran pada 1979, dimana kekuatan politik Islam Syiah meningkat, dan mendapatkan perhatian dari dunia. Pada 1980, Iraq mayoritas Sunni, memutuskan untuk berperang dengan Iran. Memang pertikaian ini bukan perkara sekte, atau mazhab dalam keagamaan, hanya saja konflik ini merembet ke arah sektarian.

Konflik sektarian juga terjadi pada 2005 di Lebanon saat terbunuhnya Perdana Menteri Rafik Hariri. Terbunuhnya Rafik Hariri disinyalir ada dukungan dari Suriah, dan juga ada campur tangan dari Hizbullah. Kejadian ini menyebabkan mobilisasi besar Sunni Lebanon untuk turun ke jalan. Dalam hal ini komunitas Sunni Lebanon yang merasa diwakilkan oleh Rafik Hariri, melawan Hizbullah yang Syiah.

Setiap persoalan politik di Timur Tengah kerap kali penambah konflik antara Sunni dengan Syiah. Seperti di Suriah, yang dimana Presiden Bashar al Assad yang menganut Syiah dengan sekti Awali berkonflik dengan pemberontak Suriah yang bermazhab Sunni. Pada konflik ini pemerintahan Suriah juga didukung oleh Iran, dan juga Hizbullah yang notabenenya adalah penganut Islam Syiah.

Yaman pun sama dengan Suriah, yang dimana kelompok Houthi, sebagai kelompok kecil Syiah Zaydi berkonflik dengan pemerintah Yaman kala itu, yang dimana bermazhab Sunni. Pemerintah Yaman didukung oleh Arab Saudi, sedangkan kelompok Houthi didukung Iran.

Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Maka dari itu dapat diartikan bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan bagi Islam. Tugas dari Muslim itu sendiri adalah bagaimana menyikapi perbedaan itu sendiri.

Surah Al-Hujurat [49]: ayat 13

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti*

Sebagaimana Islam yang menjunjung tinggi nilai silaturahmi, maka forum keislaman, atau organisasi multilateral negara-negara islam dirasa bisa dijadikan alat untuk memperkuat tali persaudaraan antar negara mayoritas Muslim. Juga kerjasama di bidang ekonomi bisa membuat perdamaian, dan stabilitas diantara negara-negara Islam.

Mengambil contoh Uni Eropa, yang dimana selepas perang dunia, perdamaian dihadirkan dengan kerjasama bidang ekonomi. Pada 1951 komunitas kerja batubara, dan baja yang membuat negara di Eropa berhenti berperang satu sama lain. Berdasarkan rencana Schuman, enam negara menandatangani perjanjian untuk menjalankan industri batubara dan baja mereka di bawah manajemen bersama. Dengan cara ini, tidak ada negara tunggal yang dapat membuat senjata perang untuk digunakan melawan negara lain, seperti yang terjadi di masa lalu. Enam negara tersebut adalah Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Belgia, dan Luksemburg. Komunitas Batubara dan Baja Eropa terbentuk pada tahun 1952 (European Union).

Interaksi antara Islam dan politik dalam negeri, atau politik internasional hanya bisa terjadi jika ada perubahan di dalam kalangan umat Islam sendiri. Memulihkan citra Islam secara moderat, dan terbuka, sebab ini memberikan umat Islam alat yang mereka perlukan untuk mengembangkan ide-ide politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka sambil juga memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan ini memungkinkan politik Islam, untuk tetap mematuhi keyakinan bahwa kita tidak harus melalui sejarah Barat untuk memahami apa itu kehidupan yang baik dan tata pemerintahan yang adil. Setiap cendekiawan harus mengenali kapan agama memainkan peran yang lebih penting daripada sekadar mencerminkan budaya atau faktor sosial-ekonomi. Hanya dengan pendekatan ini, melibatkan baik Islamis politik maupun para peneliti yang menganalisis perilaku mereka, pandangan alternatif tentang Hubungan Internasional, termasuk perspektif Islam, dapat benar-benar terbentuk (Faiz Sheikh 2016).

PENUTUP / KESIMPULAN

Islam mengajarkan bagaimana setiap umatnya untuk bertindak. Kebajikan-kebajikan yang ditawarkan oleh Islam adalah modal penting untuk bermasyarakat. Perihal bagaimana konsep negara, hal tersebut bisa didiskusikan, atau disesuaikan sebagaimana negara itu masing-masing, sebab di Islam sendiri, tidak ada konsep pasti dalam bernegara.

Nilai universal agama Islam *rahmatan lil alamin* bisa dipraktekan dalam keseharian dalam bernegara, yang jika dilakukan maka akan hilang konflik sektarianisme, dan sebagainya.

Dalam hubungan internasional, negara-negara Islam bisa bekerjasama di berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi, yang dimana sebenarnya sudah ada organisasi multilateral Organisasi Kerjasama Islam (OKI), diharapkan organisasi ini bisa lebih berfungsi. Kerjasama ekonomi ini juga diharapkan akan berefek bagus terhadap kerjasama lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando Salvatore. 2016. *The Public Sphere: Liberal Modernity, Catholicism, Islam*. Palgrave MacMillan.
- Ayoob, Mohammed, and Danielle Nicole Lussier. 2020. *No Title*. Second. Michigan: University of Michigan Press.
- Faiz Sheikh. 2016. *Islam and International Relations: Exploring Community and the Limits of Universalism (Global Dialogues: Non Eurocentric Visions of the Global)*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Fata, Ahmad Khoirul, and Mahfud Fauzi. 2021. "FROM KHILÂFAH TO MODERN STATE : The History of Islamic Political Transformation." *Ulil Albab* 22(1):1-22.

doi:<https://doi.org/10.18860/ua.v22i1.11793>.

International, Transparency. 2023. "Corruption Perceptions Index 2023."

<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

IQBAL BASYARI. 2022. "Jadikan Forum R-20 Sebagai Gerakan Global." *Kompas*, November 1.

Mohammed, Samih Salah. 2024. "Islamic View towards International Relations." *Indonesian Journal of Islamization Studies* 01(02):172-96. doi:10.21111/injas.v1i2.10472.

Nugraha, Aryanta. 2012. "Moderate Islam as New Identity in Indonesian Foreign Policy : Between Global Role Aspiration and Co-Religious Solidarity." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 1. doi:<https://doi.org/10.24252/jicsa.v1i1.712>.

OIC. n.d. "History of The Organisation of Islamic Cooperation (OIC)." History.

Research, Pew. 2012. "No Title." <https://www.pewresearch.org/religion/2012/12/18/global-religious-landscape-exec>.

Union, European. n.d. "History of the European Union 1945-59." https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59_en.